

**PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, SISTEM
PENGENDALIAN INTERNAL, KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Empiris Pada Badan Keuangan Daerah Pemerintah Boyolali)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan program studi Strata I
pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

Oleh:

YUYUN RATNAMAS RAHHIL

B 200 140 148

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, SISTEM
PENGENDALIAN INTERNAL, KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Empiris Pada Badan Keuangan Daerah Pemerintah Boyolali)**

PUBLIKASI ILMIAH

Yang ditulis oleh:

YUYUN RATNAMAS RAHHIL
B 200 140 148

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



Dr. Erma Setiawati, M.M., AK., CA

NIDN. 0610106401

HALAMAN PENGESAHAN

**PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, SISTEM
PENGENDALIAN INTERNAL, KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Empiris Pada Badan Keuangan Daerah Pemerintah Boyolali)**

Oleh:

YUYUN RATNAMAS RAHHIL

B 200140148


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis


Universitas Muhammadiyah Surakarta


Pada hari Kamis, 07 Agustus 2018

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Dr. Erma Setiawati, M.M., AK., CA ()
(Ketua Dewan Penguji)

2. Shinta Permata Sari, SE, M.M ()
(Anggota 1 Dewan Penguji)

3. Drs Eko S., M.Si ()
(Anggota 2 Dewan Penguji)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Syamsudin, M.M)

NIDN.017025701

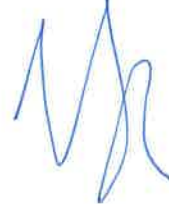
PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak dapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 07 Agustus 2018

Penulis



YUYUN RATNAMAS R

B 200140148

**PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, SISTEM
PENGENDALIAN INTERNAL, KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Empiris Pada Badan Keuangan Daerah Pemerintah Boyolali)**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali. Jumlah sampel yang diambil 48 pegawai. Penelitian ini menggunakan sampel jenuh. Data dikumpulkan dengan metode survey. Teknik analisis data yang digunakan adalah Regresi Linear Berganda. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, sedangkan Kompetensi Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Kata kunci: Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Abstract

This study aims to identify the impact of the implementation of government standard accountancy, system of internal control, human resource competency, and utilization of information technology on the quality of financial statement. The approach used in this study is a quantitative approach. This research was conducted on the office of the District Finance Agency of Boyolali district. The sample in this research is 48 of performance. This sample were taken by using the saturated sampling method. Data were collected using a survey method. Data analysis technique used is multiple linear regression. The results showed that the implementation of government standard accountancy, internal control system, and utilization of information has significant effect on quality of financial statement, while competences of human resources have no significant effect on quality of financial statements.

Keywords: Government Standard Accountancy, System Of Internal Control, Human Resource Competency, Utilization Of Information, Quality Of Financial Statement.

1. PENDAHULUAN

Pemerintah adalah entitas pelapor (reporting entity) yang harus membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggung jawabannya karena : (a) pemerintah

menguasai dan mengendalikan sumber-sumber yang signifikan; (b) penggunaan sumber-sumber tersebut oleh pemerintahan yang dapat berdampak luas terhadap kesejahteraan dan ekonomi rakyat; dan (c) terdapat pemisahan antara manajemen dan pemilikan sumber-sumber tersebut (Nurillah, 2014).

Sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Laporan keuangan pemerintah kemudian disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Adapun komponen laporan keuangan yang disampaikan tersebut meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (Nurillah, 2014).

Standar akuntansi pemerintahan merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Tujuan diberlakukannya hal tersebut agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah. Dengan diterapkannya standar akuntansi pemerintahan yang baik, maka pemerintah daerah akan memiliki kualitas informasi yang baik, karena laporan keuangan pemerintah daerah harus sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Kualitas laporan keuangan adalah sejauh mana laporan keuangan yang disajikan menunjukkan informasi yang benar dan jujur. Kualitas laporan keuangan berguna sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi bagi pihak yang berkepentingan. Kualitas laporan keuangan dengan berbagai pengukurannya, umumnya digunakan dalam keputusan investasi, perjanjian kompensasi dan persyaratan hutang. Oleh

karena itu, dibutuhkan sistem pengendalian internal yang efektif (Udiyanti et al, 2014).

Menurut Nurillah (2014), laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkompetensi, maka kompetensi sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi sangatlah penting. Begitujuga di entitas pemerintahan, untuk menghasilkan Laporan Keuangan Daerah yang berkompetensi dibutuhkan SDM yang memahami dan kompeten dalam Akuntansi pemerintahan, keuangan daerah bahkan organisasional tentang pemerintahan. Kompetensi sumber daya manusia sangat diperlukan agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat berkualitas dan bermanfaat dalam hal pengambilan keputusan. (Wati, et al., 2014).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik. Pemerintah perlu mengoptimasikan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja.

Penelitian mengenai pengaruh keterlibatan pengguna sistem informasi, kemampuan teknik personal sistem informasi, dukungan manajemen puncak, dan formulasi pengembangan sistem informasi terhadap kinerja sistem informasi akuntansi ini telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu, diantaranya yaitu : Antari et all (2015), Biwi et all (2015), Dharmawan et all (2017), Utama Raka Cakra (2017), Insani Aulia (2017), Mardiana et all (2014), Prabowo et all (2013), Sulastrini et all (2014), Susetyo et all (2016), dan Utami et all (2016).

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Udiyanti et al (2014) yang berjudul Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan,

Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Staff Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan mengganti variable Kompetensi Staff Akuntansi menjadi Kompetensi Sumber Daya Manusia dan menambah satu variable independen yaitu Pemanfaatan Teknologi Informasi yang saya ambil dari penelitian yang dilakukan oleh Alamsyah et al (2017).

2. METODE

Populasi Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pegawai Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali. Sampel dalam penelitian ini dilakukan secara *non probability sampling* dengan menggunakan teknik *Convinience sampling* adalah pegawai Badan Keuangan Daerah Pemerintah Boyolali yang mau dijadikan responden (Sugiyono, 2012:96).

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kualitas laporan keuangan adalah sejauh mana laporan keuangan yang disajikan menunjukkan informasi yang benar dan jujur. Kualitas laporan keuangan berguna sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi bagi pihak yang berkepentingan. (Putri et al, 2015). Indikator yang meliputi elemen-elemen penting dalam variabel kualitas laporan keuangan, yaitu: (a) Relevan, (b) Andal, (c) Dapat dibandingkan, (d) Dapat dipahami. Variabel ini terdapat 8 pertanyaan mengenai Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk responden. Jawaban dari setiap pertanyaan mempunyai skor dari sangat tidak setuju (STS), tidak setuju (TS), netral (N), setuju (S), dan sangat setuju (SS). Masing-masing pertanyaan diberi skor untuk kemudahan dalam penelitian. Skor 1 untuk sangat tidak setuju (STS), skor 2 untuk tidak setuju (TS), skor 3 untuk netral (N), skor 4 untuk setuju (S), skor 5 untuk sangat setuju (SS).

Analisis yang digunakan adalah Analisis Regresi Linier Berganda. Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap variabel dependen. Model persamaan regresi untuk menguji hipotesis dengan formulasi sebagai berikut:

$$KLKPD = \alpha + \beta_1 SAP + \beta_2 SPI + \beta_3 KSDM + \beta_4 PTI + e \quad (1)$$

Keterangan:

KLKPD = Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

A	= Konstanta
B	= Koefisien Regresi
SAP	= Standar Akuntansi Pemerintahan
SPI	= Sistem Pengendalian Internal
KSDM	= Kompetensi Sumber Daya Manusia
PTI	= Pemanfaatan Teknologi Informasi
e	= Standar Error

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Badan Keuangan Daerah Boyolali. Yang berjumlah 79 orang. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner penelitian secara langsung kepada responden yang bekerja pada Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali. Penyebaran kuesioner, di sebarakan keseluruh pegawai sebanyak 79 kuesioner. Dari jumlah tersebut 68 kuesioner dapat kembali dan terisi penuh, dan terdapat sebanyak 11 kuesioner tidak kembali. Berikut adalah perincian mengenai pendistribusian dan pengembalian kuesioner.

Tabel 1. Data Sampel Penelitian

No	Keterangan	Jumlah
1	Kuesioner yang disebarkan	79
2	Kuesioner yang kembali	68
3	Kuesioner yang tidak kembali	11
4	Data yang diperoleh	68
5	<i>Usable respon rate</i> = $68/79 \times 100\%$	86,07%

Sumber : data yang diolah peneliti, 2018

Tabel 2. Uji Statistik Deskriptif Data

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Mean	Standar Deviasi
SAP	68	33,00	51,00	42,5588	3,63803
SPI	68	32,00	50,00	41,0000	4,24264
KSDM	68	17,00	28,00	22,3235	2,86221
PTI	68	24,00	40,00	32,7941	3,34824
KLKPD	68	24,00	40,00	32,5000	3,53870

Sumber: data yang diolah oleh peneliti, 2018

Berdasarkan Tabel 2 diketahui bahwa jumlah responden (N) adalah 68. Hasil analisis dari statistik deskriptif terhadap variable Standar Akuntansi Pemerintah memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 42,5588, nilai minimum

sebesar 33,00, nilai maksimum sebesar 51,00, dan nilai standar deviasi sebesar 3,63803. Kondisi ini menunjukkan bahwa responden cenderung menjawab setuju memiliki Standar Akuntansi Pemerintah yang baik dilihat dari nilai rata-rata mendekati nilai maksimum 51,00.

Hasil analisis dari statistik deskriptif terhadap variabel Sistem Pengendalian Internal memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 41,0000, nilai minimum sebesar 32,00, nilai maksimum sebesar 50,00, dan nilai standar deviasisebesar 4,24264. Kondisi ini menunjukkan bahwa responden cenderung menjawab setuju memiliki Sistem Pengendalian Internal yang baik dilihat dari nilai rata-rata mendekati nilai maksimum 50,00.

Hasil analisis dari statistik deskriptif terhadap variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 22,3235, nilai minimum sebesar 17,00, nilai maksimum sebesar 28,00, dan nilai standar deviasisebesar 2,86221. Kondisi ini menunjukkan bahwa responden cenderung menjawab setuju memiliki Kompetensi Sumber Daya Manusia yang baik dilihat dari nilai rata-rata mendekati nilai maksimum 28,00.

Hasil analisis dari statistik deskriptif terhadap variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 32,5000, nilai minimum sebesar 24,00, nilai maksimum sebesar 40,00, dan nilai standar deviation sebesar 3,53870. Kondisi ini menunjukkan bahwa responden cenderung menjawab setuju memiliki Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang baik dilihat dari nilai rata-rata mendekati nilai maksimum 40,00.

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

Variabel	Kolmogorov-Smirnov	Sig (2-tailed)	p-value	Keterangan
Undstandardized residual	1,218	0,103	$P > 0,05$	Normal

Sumber: data yang diolah peneliti, 2018

Berdasarkan Tabel 3 hasil pengujian normalitas dengan Uji One Sample Kolmogrov-Smirnov Test menunjukkan nilai Sig (2-tailed) sebesar $0,103 > 0,05$, sehingga dapat dinyatakan bahwa keseluruhan data yang diperoleh memiliki sebaran yang normal.

Uji Multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Salah satu cara yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya multikoolinearitas dengan cara melihat nilai yang dipakai untuk mengetahui adanya multikonieritas. Dapat diketahui terjadi tidaknya multikolinearitas dengan berpedoman bahwa nilai $VIF < 10$ dan $Tolerance > 0,1$. Perhitungan uji Multikolinieritas penelitian ini menggunakan SPSS 21.00.

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Tolerance	VIF	Keterangan
Standar Akuntansi Pemerintah	0,637	1,571	Tidak ada multikolinieritas
Sistem Pengendalian Internal	0,725	1,130	Tidak ada multikolinieritas
Kompetensi Sumber Daya Manusia	0,766	1,305	Tidak ada multikolinieritas
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,748	1,337	Tidak ada multikolinieritas

Sumber: data yang diolah peneliti, 2018

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Penelitian ini menggunakan uji *glejtser* yaitu dengan meregres nilai *absoluteresidual* terhadap variabel independen. Tingkat probabilitas signifikansi harus menunjukkan diatas nilai 5%, maka tidak ada heterekedastisitas. Hasil pengujian heteroskedastisitas dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Kriteria	P*	Keterangan
Standar Akuntansi Pemerintah(X1)	>0,05	0,951	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Sistem Pengendalian Internal(X2)	>0,05	0,055	Tidak terjadiheteroskedastisitas
Kompetensi Sumber Daya Manusia(X3)	>0,05	0,813	Tidak terjadiheteroskedastisitas
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X4)	>0,05	0,963	Tidak terjadiheteroskedastisitas

Sumber: data yang diolah peneliti, 2018

Dari hasil uji heteroskedastisitas pada Tabel 5 di atas menunjukkan semua model memperlihatkan nilai $Sig. > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa semua model dalam penelitian ini tidak mengalami heteroskedastisitas.

Uji regresi linear berganda adalah untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yaitu kinerja sistem informasi akuntansi.

Tabel 6. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	B	T hitung	T tabel	Sig
(Constant)	15,109			
Standar Akuntansi Pemerintah	0,314	2,241	1,669	0,018
Sistem Pengendalian Internal	0,247	2,371	1,669	0,021
Kompetensi Sumber Daya Manusia	0,160	1,066	1,669	0,290
Pemanfaatan Teknologi Informasi	-0,296	-2,275	1,669	0,026

Sumber: data yang diolah peneliti, 2018

Besarnya nilai koefisien variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi (PTI) sebesar -0,296 (negatif). Tanda negatif ini berarti bahwa semakin buruk Pemanfaatan Teknologi Informasi (PTI) akan menurunkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Begitu pula sebaliknya, apabila Pemanfaatan Teknologi Informasi baik, maka Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah akan meningkat.

Tabel 7. Hasil Uji Statistik t

Variabel	T hitung	T tabel	Sig	Keterangan
(Constant)	2,930			
Standar Akuntansi Pemerintah	2,241	1,669	0,018	H ₁ Diterima
Sistem Pengendalian Internal	2,371	1,669	0,021	H ₂ Diterima
Kompetensi Sumber Daya Manusia	1,066	1,669	0,290	H ₃ Ditolak
Pemanfaatan Teknologi Informasi	-2,275	1,669	0,026	H ₄ Diterima

Sumber: data yang diolah peneliti, 2018

Dari perhitungan t hitung dari variabel Sistem Pengendalian Internal memiliki nilai thitung sebesar 2,371 lebih kecil dari ttabel sebesar 1,669 atau dapat dilihat dari signifikansi $0,021 < \alpha = 0,05$ maka H₂ diterima, yang berarti Sistem Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Dari perhitungan t hitung dari variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia memiliki nilai thitung sebesar 1,066 lebih kecil dari ttabel sebesar 1,669 atau dapat dilihat dari signifikansi $0,290 > \alpha = 0,05$ maka H₃ ditolak, yang berarti Kompetensi Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Dari perhitungan t hitung dari variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi memiliki nilai thitung sebesar -2,275 lebih kecil dari ttabel sebesar 1,669 atau dapat dilihat dari signifikansi $0,026 < \alpha = 0,05$ maka H4 diterima, yang berarti Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (terikat). Apabila tingkat probabilitasnya $< 0,05$ maka dapat dikatakan bahwa semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh simultan terhadap variabel terikat. Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh sebagai berikut:

Untuk hasil Uji F didapatkan bahwa nilai Fhitung sebesar 6,289 lebih besar dari Ftabel sebesar 2,52 dengan angka signifikansi $0,000 < 0,05$. Hal ini berarti bahwa model penelitian adalah fit atau dengan kata lain ada pengaruh yang signifikan antara Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (KLKPD).

Tabel 8. Hasil Uji Determinasi R^2

Model	R	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	0,534	0,205	0,240	3,08497

Sumber: data yang diolah peneliti, 2018

Dari hasil perhitungan diperoleh nilai nilai adjusted R square sebesar 0,240. Hal ini menunjukkan bahwa 24% variasi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah bisa dijelaskan oleh variasi Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi. Sedangkan sisanya 76% lainnya dijelaskan oleh variasi lain di luar model.

3.2 Pembahasan

Berdasarkan pengujian hipotesis pertama mendapatkan hasil bahwa variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah mempunyai thitung sebesar 2,421 lebih besar dari ttabel sebesar 1,669 atau dapat dilihat dari signifikansi $0,018 < \alpha = 0,05$

maka H1 diterima, sehingga Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Standar akuntansi pemerintahan merupakan pedoman di dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Standar akuntansi pemerintahan adalah syarat mutlak yang harus dijadikan pedoman agar kualitas laporan keuangan di Indonesia dapat ditingkatkan (PP No. 71 Tahun 2010).

Standar akuntansi pemerintahan merupakan acuan dalam menyusun laporan keuangan. Sehingga standar akuntansi keuangan merupakan faktor penting yang dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Apabila standar akuntansi pemerintahan telah dipahami maka akan dapat menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan dengan benar. Oleh karena itu, pemerintah harus dapat menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Kualitas laporan keuangan daerah yang baik akan berdampak pula pada tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Udiyanti et al (2014) dan Wati (2014) yang menyimpulkan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan pengujian hipotesis kedua mendapatkan hasil bahwa variabel Sistem Pengendalian Internal memiliki nilai thitung sebesar 2,371 lebih kecil dari ttabel sebesar 1,669 atau dapat dilihat dari signifikansi $0,021 < \alpha = 0,05$ maka H2 diterima, sehingga Sistem Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 pengertian Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. PP No. 60/2008, bahwa unsur system pengendalian intern dalam Peraturan Pemerintah ini mengacu

pada unsur sistem pengendalian intern yang telah dipraktikan di lingkungan pemerintah di berbagai Negara, yang meliputi: lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan penguatan system pengendalian internal.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Alamsyah et al (2017), Nagor et al (2015), Putri et al (2015), Sari (2016), Udiyanti et al (2014), dan Yeny et al (2016) yang menyimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan pengujian hipotesis ketiga mendapatkan hasil bahwa variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia mempunyai thitung sebesar 1,066 lebih kecil dari ttabel sebesar 1,669 atau dapat dilihat dari signifikansi $0,290 > \alpha = 0,05$ maka H3 ditolak, sehingga Kompetensi Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Hasil ini dapat dijelaskan bahwa ketidaksignifikan ini mungkin disebabkan oleh kondisi sumber daya manusia di subbagian akuntansi atau tata usaha keuangan yang belum mendukung baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Dari segi kualitas, sebagian besar pegawai subbagian akuntansi atau tata usaha keuangan tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi dan hal ini dilihat dari data demografi responden. Uraian tugas dan fungsi subbagian atau tata usaha keuangan yang ada juga masih terlalu umum (belum terspesifikasi dengan jelas). Dari sisi kuantitas, masih sangat sedikit jumlah akuntan atau pegawai yang berpendidikan tinggi akuntansi, sementara peraturan perundang-undangan telah mewajibkan setiap satuan kerja untuk menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan. Kelemahan yang ada diimbangi dengan mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah seperti pelatihan perpajakan, pelatihan bendahara, pelatihan SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah) keuangan, dan pelatihan penatausahaan pengelola.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Yeny et al (2016) yang menyimpulkan bahwa Kompetensi SDM tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan pengujian hipotesis keempat mendapatkan hasil bahwa variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi memiliki nilai thitung sebesar -2,275 lebih kecil dari ttabel sebesar 1,669 atau dapat dilihat dari signifikansi $0,026 < \alpha = 0,05$ maka H4 diterima, sehingga Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.. Nilai negatif pada thitung (-2,275) menunjukkan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi yang telah di terapkan oleh Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Boyolali masih kurang optimal atau dapat dikatakan belum maksimal.

Teknologi informasi adalah teknologi yang fungsinya digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan menyusun, menyimpan untuk menghasilkan informasi yang berkualitas di manakualitas tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi, bisnis, dan pemerintahan.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Alamsyah et al (2017), Sari (2016), dan Yeny et al (2016) yang menyatakan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

4. PENUTUP

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel penerapan standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian internal dan pemanfaatan teknologi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang dialami, antara lain Penelitian ini menggunakan kuesioner dalam pengambilan jawaban dari responden, sehingga penulis tidak mengawasi secara langsung atas pengisian jawaban tersebut, dikarenakan hampir semua kuesioner tersebut pada saat pengisian tidak dapat di tunggu secara langsung, sehingga jawaban dari responden mungkin tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya dikarenakan kondisi-kondisi tertentu masing-masing responden. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini hanya mencakup Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi saja, padahal masih banyak faktor-faktor

yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Obyek penelitian hanya terbatas pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Boyolali.

Berdasarkan beberapa keterbatasan yang telah disampaikan maka saran untuk peneliti selanjutnya yaitu, Untuk meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, sebaiknya BKD di Kabupaten Boyolali lebih memperhatikan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi sehingga paham terhadap standar dan aturan yang sudah ditetapkan. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk meneliti pengaruh dari variabel-variabel lain yang belum termasuk dalam penelitian ini. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan memperluas subjek penelitian, tidak terfokus pada satu dinas seperti pada penelitian ini yang hanya terfokus pada satu dinas yaitu BKD di Kabupaten Boyolali.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah M Rifky, Rahayu Sri, Muslih M. 2017. Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kineja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Depok). Vol 15 No. 2.
- Andini Dewi, Yusrawati. 2015. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Volume 24 No. 1.
- Desmiyawati. 2014. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keandalan Dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan (Studi Empiris Pada SKPD Pemda Riau. Jurnal Akuntansi, Vol. 2, No. 2, April 2014: 163-178 ISSN 2337-4314.
- Ghozali Imam. 2009. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*. Cetakan IV. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Edisi 5. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Nagor Teuku Fahrian, Dr. Darwanis, M. Si, Ak, Dr. Syukriy Abdullah, SE, M.Si, Ak. 2015. Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Dan Penerapan Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan

Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Barat. ISSN 2302-0164 Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala. Volume 4 No. 1.

Nurillah As Syifa. 2014. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Skripsi Universitas Diponegoro: Semarang.

Putri Ni Ketut R, Nyoman Ari S. D, Desak Nyoman S. W. 2015. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Volume 3 No. 1.

Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Republik Indonesia. 2004. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Republik Indonesia. 2004. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan.

Republik Indonesia. 2008. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pengertian Sistem Pengendalian Intern.

Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sari Nilam. 2016. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemahaman Akuntansi, Penerapan Sap, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bungo). Vol 3 No. 1.

Setiawati Erma dan Shinta Permata Sari. 2014. Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Ditinjau Dari Sumber Daya Manusia, Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pemahaman Akuntansi (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Wilayah Eks Karesidenan Surakarta. ISBN: 978-602-70429-2-6.

Setyowati Lilis, Wikan Isthika, Ririh Dian Pratiwi. 2016. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang. Volume 20 No. 2.

- Sudiarianti Ni Made, Ulupui I Gusti K. A, Budiasih I. G. A. 2015. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Penerapan Sistem *Pengendalian Intern Pemerintah Dan Standar Akuntansi Pemerintah Serta Implikasinya Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Simposium Nasional Akuntansi 18. Universitas Sumatera Utara, Medan. 16-19 September 2015.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Udiyanti Ni luh N. A, Anantawikrama T. A, Nyoman Ari S. D. 2014. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal Dan Kompetensi Staff Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Volume 2 No. 1.
- Wati Kadek D, Herawati Trisna N, Sinarwati NK. 2014. Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan Sap, Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Vol 2 No. 1.
- Wijayanti Lilis. 2017. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Dan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Yeny, Karamoy Herman, Poputra Agus T. 2016. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Wondama. ISSN 2303-1174 Jurnal EMBA. Vol 4 No. 3.
- Yusniyar, Darwanis, Syukriy Abdullah. 2016. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Dan Pengendalian Intern Terhadap GOOD GOVERNANCE Dan Dampaknya Pada Kualitas Laporan Keuangan. ISSN 2302-0164 Jurnal Akuntansi Universitas Syiah Kuala. Volume 5 No. 2.